

Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia

Yeniwati¹, Hefrizal Handra², Eva Yonnedi³

¹ Universitas Negeri Padang, Indonesia, yeniwati.unp@gmail.com

^{2,3} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan fokus pada periode 2011 hingga 2023. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan peluang kerja, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi, penelitian ini menemukan bahwa jumlah uang beredar dan investasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan suku bunga kredit berpengaruh negatif. Selain itu, pengeluaran pemerintah berkontribusi secara positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan makroekonomi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Kata Kunci: *Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, penyerapan tenaga kerja, data panel.*

Abstract

This article discusses the impact of monetary and fiscal policies on labor absorption in Indonesia, focusing on the period from 2011 to 2023. Sustainable economic development heavily relies on the availability of job opportunities, which are influenced by economic growth and government policies. Utilizing panel data from 33 provinces, this study finds that the money supply and investment have a significant positive impact on labor absorption, while credit interest rates have a negative effect. Additionally, government spending positively contributes to the increase in labor absorption. The findings highlight the importance of integrated macroeconomic policies to address employment challenges in Indonesia, especially in the context of post-pandemic economic recovery.

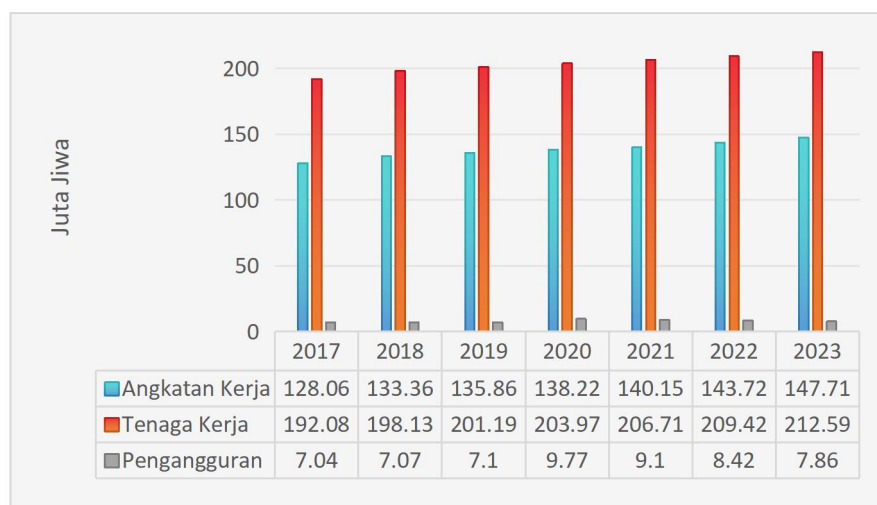
Keywords: *Monetary policy, fiscal policy, labor absorption, panel data.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan peluang kerja (Basuki et al, 2023). Santanu et al (2023) menyatakan bahwa ketersediaan peluang kerja memengaruhi pendapatan, yang selanjutnya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi, terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Sokian et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari output, bergantung pada input sebagai faktor produksi (Mankiw, 2006); semakin tinggi output nasional, semakin besar kebutuhan akan modal dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah komponen penting dalam pembangunan ekonomi, berfungsi sebagai objek yang memerlukan perlindungan dan kesejahteraan serta sebagai pelaku pembangunan itu sendiri (Indriani, 2016). Namun, isu ketenagakerjaan tetap menjadi tantangan di Indonesia (Adriyanto et al., 2020), salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang meningkatkan angkatan

kerja tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja baru, berpotensi menambah angka pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 278,69 juta. Selama periode tahun 2017 hingga 2023 jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 6,64 persen. Dimana jumlah penduduk yang mendominasi pada tahun 2023 adalah penduduk usia produktif sebesar 69,13%. (BPS 2024). Dengan penduduk usia produktif yang besar mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai. Menurut Chowdhury dan Hossain (2018) pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya kesempatan kerja dapat menghambat pembangunan ekonomi. Gambar 1 memperlihatkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.



Sumber: BPS, Data Diolah

Gambar 1. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2017-2023 (Juta Jiwa)

Pada Gambar 1 menggambarkan data mengenai angkatan kerja, tenaga kerja, dan pengangguran dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks di Indonesia. Angkatan kerja meningkat dari 128,06 juta pada 2017 menjadi 147,71 juta pada 2023, mencerminkan pertumbuhan populasi yang terus bertambah dan tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Jumlah tenaga kerja juga tumbuh dari 192,08 juta menjadi 212,59 juta, namun pertumbuhan ini tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, menyebabkan banyak individu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, angka pengangguran mencapai puncaknya pada 9,77% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dan meskipun menurun menjadi 7,86% pada 2023, tantangan dalam mengurangi angka pengangguran dan menciptakan kesejahteraan tenaga kerja tetap ada.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan (Kemnaker, 2020). Pemerintah telah melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, terutama dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingginya tingkat pengangguran (Sirojuzilam, 2021; Atmojo, 2018). Hapsoro et al (2013) menyatakan bahwa perbedaan tingkat pengangguran antarprovinsi dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah, sedangkan Triwibowo et al (2023) menambahkan bahwa kecepatan transmisi kebijakan moneter juga berpengaruh pada aktivitas ekonomi riil. Ini menunjukkan bahwa kedua kebijakan tersebut berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional dan provinsi.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar (Bank Indonesia, 2024). Menurut Warjiyo (2004), meskipun tujuan akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga yang tercermin dari inflasi rendah, bank sentral juga memperhatikan tujuan ekonomi lain, seperti peningkatan output dan kesempatan kerja, sejalan dengan misi Bank Indonesia untuk mendukung kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mehar (2023) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Meskipun kebijakan moneter diatur secara terpusat oleh Bank Indonesia, dampaknya terhadap sektor riil dapat bervariasi di setiap wilayah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki beragam kondisi geografis dan sosial ekonomi (Ridhwan et al., 2014).

Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga (Pohan, 2008), yang dapat memengaruhi sektor riil melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter (MTKM). Menurut Syakur et al. (2022), kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdampak pada suku bunga jangka pendek, seperti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), yang selanjutnya memengaruhi suku bunga jangka panjang, termasuk suku bunga deposito dan kredit; suku bunga kredit yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan kredit, yang berimplikasi pada investasi dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Implementasi kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari kebijakan makroekonomi lainnya, termasuk kebijakan fiskal (Pohan, 2008). Pengelolaan perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan pendapatan nasional dan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan permintaan agregat. Di Indonesia, kebijakan fiskal dilaksanakan secara desentralisasi, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluarannya (Hastuti, 2018). Dengan pelimpahan wewenang ini, diharapkan kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan berdampak positif pada target pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Sudirman, 2014).

Meskipun banyak penelitian telah membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja, analisis yang mengkaji pengaruh simultan antara kebijakan moneter dan fiskal masih terbatas. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Asaleye et al. (2018), Sekmen et al (2019), serta Ningsih (2024), hanya fokus pada pengaruh kebijakan moneter. Di sisi lain, Ulya et al. (2022), dan Santanu et al(2023) hanya menggunakan kebijakan fiskal dalam analisis determinan penyerapan tenaga kerja. Wahidin (2018) mengkaji pengaruh kedua kebijakan tersebut, tetapi terbatas pada satu provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Azolibe et al. (2022) dan Sirojuzilam (2021) menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap ketenagakerjaan, tetapi menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Konsep Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik membagi penduduk menjadi dua kategori: penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia di atas 15 tahun, dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja diklasifikasikan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, di mana angkatan kerja mencakup individu yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta mereka yang menganggur. Sebaliknya, penduduk usia kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau menjalankan aktivitas lain disebut sebagai bukan angkatan kerja. Berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah individu yang bekerja untuk memproduksi barang dan/atau jasa, baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Mulyadi (2003) dalam Arida et al. (2015) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan untuk aktivitas tersebut. Alvaro (2021) juga menyatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang menyediakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan barang dan jasa demi keuntungan perusahaan, sementara pekerja mendapatkan upah sesuai dengan tingkat keahlian. Dengan demikian, tenaga kerja dapat disimpulkan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pemberian balas jasa berupa upah.

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan dalam periode tertentu pada berbagai tingkat upah (Sholeh, 2007). Permintaan terhadap tenaga kerja dipicu oleh adanya permintaan atas output produksi; ketika permintaan konsumen akan barang dan jasa meningkat, perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk meningkatkan output. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dari produksi barang dan jasa (Borjas, 2008). Dalam jangka pendek, perusahaan tidak akan mengubah ukuran pabrik atau membeli perlengkapan fisik, sehingga dapat meningkatkan output dengan menambah tenaga kerja. Tambahan output dari satu unit tenaga kerja disebut *Marginal Product of Labor (MPL)*, sedangkan tambahan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja disebut *Value of Marginal Product (VMPL)*, yang dihitung dengan mengalikan harga (p) dengan MPL.

$$VMPL = p \times MPL \quad (1)$$

Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mempekerjakan tenaga kerja hingga titik di mana VMPL sama dengan upah atau $VMPL = w$. Dimana Dalam jangka panjang modal tidak bersifat tetap sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan memilih berapa banyak pekerja untuk dipekerjakan dan berapa banyak modal untuk berinvestasi.

Penawaran tenaga kerja merupakan total tenaga kerja yang tersedia dalam periode waktu tertentu pada tiap kemungkinan tingkatan upah. Menurut Becker (1976) dalam Sholeh (2007) kepuasan seseorang didapatkan dengan melakukan konsumsi atau menikmati waktu luang, tetapi waktu dan pendapatan yang tersedia menjadi kendala yang dihadapi. Individu bekerja dengan mengorbankan waktu luangnya, sehingga tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai kompensasinya. Tingkat upah dan pendapatan lain menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tenaga kerja untuk menambah atau mengurangi waktu luangnya.

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Effendi (2014), penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah lapangan kerja yang telah terisi, yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja. Todaro (2003) menambahkan bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi ketika pekerja diterima untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya atau ketika terdapat kesempatan kerja yang tersedia bagi pencari kerja. Hierdawati (2022) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh suatu unit usaha tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah total penduduk yang bekerja dan terdistribusi dalam berbagai sektor ekonomi. Permintaan tenaga kerja menjadi faktor penyebab penyerapan tenaga kerja (Konadi et al, 2014). Oleh karena itu, hubungan antara penawaran tenaga kerja dari pencari kerja dan permintaan tenaga kerja dari perusahaan sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Bellante et al, 1990).

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan wewenang bank sentral dalam memengaruhi perkembangan variabel moneter, seperti jumlah uang beredar dan suku bunga (Mishkin 2012). Hal ini dikakukan untuk mencapai tujuan utama, yakni memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam hal ini stabilitas nilai rupiah meliputi kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Stabilitas harga barang dan jasa diukur dengan inflasi yang rendah dan stabil. Sementara stabilitas nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (Bank Indonesia 2024). Warjiyo (2004) menjelaskan meskipun tujuan akhir kebijakan moneter adalah inflasi, bank sentral tidak mengabaikan pencapaian tujuan-tujuan lain, seperti pertumbuhan output dan kesempatan kerja. Artinya, dalam membuat kebijakan bank sentral berupaya mempertimbangkan kestabilan pertumbuhan output dan kesempatan kerja.

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengurangi aktivitas ekonomi dengan mengurangi jumlah uang beredar.

Indikator kebijakan moneter adalah variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang perubahan sektor riil sehingga dapat dapat menunjukkan seberapa jauh kebijakan moneter bergerak ke arah sasaran yang diinginkan (Iswandir, 2013). Menurut Pohan (2008) indikator kebijakan moneter disebut sebagai *intermediate target* yang ingin dikontrol oleh bank sentral sebagai upaya mencapai sasaran akhir. Terdapat dua indikator yang dapat digunakan, yaitu suku bunga dan jumlah uang beredar.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dilaksanakan dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai stabilitas perekonomian yang lebih baik dan mempercepat pembangunan ekonomi yang diinginkan (Sudirman, 2014). Kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola permintaan, di mana penggunaan pajak dan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menggeser kurva permintaan agregat.

Menurut Nanga (2005), kebijakan fiskal dibedakan menjadi kebijakan fiskal aktif (*diskresioner*) dan kebijakan fiskal pasif (*nondiskresioner*). Kebijakan fiskal aktif mencakup keputusan pemerintah untuk mengubah pajak dan pengeluaran, yang bisa bersifat ekspansif atau kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan/atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Di sisi lain, kebijakan fiskal nondiskresioner, atau penstabil otomatis, adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah sesuai dengan kondisi ekonomi tanpa memerlukan tindakan eksplisit dari pembuat kebijakan.

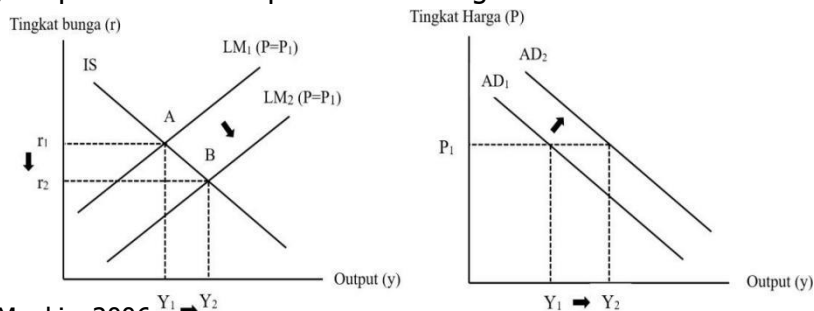
Menurut Ulya et al. (2022) pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk aktivitas produktif dapat memperlancar proses produksi dan menimbulkan multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran. Besarnya pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya prospek pendapatan dari pajak, kondisi perekonomian saat ini serta isu yang sedang dihadapi, beberapa pertimbangan politik, serta stabilitas ekonomi.

Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pendekatan Model IS-LM dan Kurva Aggregate Demand

Menurut Mankiw (2006) model IS-LM merupakan kerangka umum yang dapat digunakan dalam menganalisis interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar barang dan pasar uang dalam jangka pendek. Model ini dapat menunjukkan faktor

yang menyebabkan output berubah ketika tingkat harga tetap atau dapat dikatakan faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat. Menurut Nanga (2005) model IS-LM dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian.

Dampak kebijakan moneter dapat digambarkan dalam pergeseran kurva LM (*Liquidity Preference-Money Supply*). Kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan output yang terjadi di pasar uang. Kurva LM dapat diturunkan melalui teori preferensi likuiditas yang menjelaskan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang.



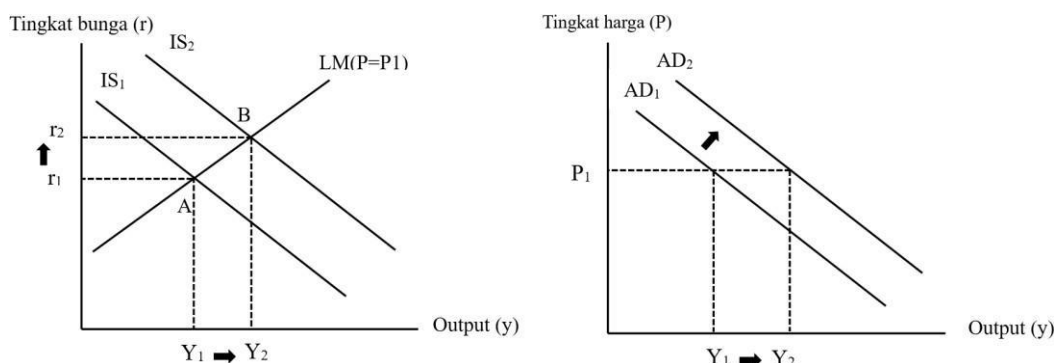
Sumber: Mankiw, 2006

Gambar 2. Kebijakan moneter ekspansif pada model IS-LM dan kurva AD

Keseimbangan awal terjadi pada titik IS dan LM₁, di mana tingkat bunga berada di r₁ dan output di Y₁, menghasilkan kurva permintaan agregat AD₁. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Peningkatan ini akan menggeser kurva LM ke kanan dari LM₁ ke LM₂, sehingga keseimbangan IS-LM berpindah dari titik A ke titik B. Akibatnya, suku bunga turun dari r₁ menjadi r₂, yang mendorong peningkatan investasi. Karena investasi merupakan komponen dari permintaan agregat, peningkatan investasi akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan menjadi AD₂. Dengan demikian, peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan pergeseran permintaan agregat ke kanan dan peningkatan output, sesuai dengan pernyataan Sudirman (2014) bahwa pengendalian uang beredar dapat memengaruhi variabel ekonomi di sektor riil, seperti tingkat harga, investasi, dan produksi. Peningkatan kapasitas produksi mendorong pemanfaatan faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja, di mana meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja (Wahidin, 2018). Hal ini sejalan dengan Irawan (2021) yang menyatakan bahwa output yang tinggi membuka peluang kerja bagi pencari kerja. Oleh karena itu, kebijakan moneter ekspansif yang meningkatkan jumlah uang beredar dapat berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pendekatan Model IS-LM dan Kurva Aggregate Demand

Dampak dari kebijakan fiskal dapat terlihat melalui pergeseran kurva IS (*Investment & Saving*). Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan output yang terjadi di pasar barang dan jasa, yang berasal dari model keynesian cross. Model ini menunjukkan titik perpotongan antara pengeluaran yang direncanakan (*planned expenditure*) dan garis 45 derajat, yang mencerminkan kondisi di mana pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual (*actual expenditure*).



Sumber: Mankiw, 2006

Gambar 3. Kebijakan Fiskal Ekspansif Pada Model IS-LM dan kurva AD

Keseimbangan awal terjadi pada IS₁ dan LM, di mana tingkat bunga berada di r_1 dan output di Y_1 , menghasilkan kurva permintaan agregat AD₁. Jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan pengeluaran, kurva IS₁ akan bergeser ke kanan menjadi IS₂. Akibatnya, keseimbangan pada IS-LM berpindah dari titik A ke titik B, dengan peningkatan output dari Y_1 ke Y_2 pada tingkat harga P. Hal ini juga menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat dari AD₁ ke AD₂. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dan diikuti oleh peningkatan output. Peningkatan kapasitas produksi akan mendorong penggunaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja, sehingga kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu gabungan data *time series* dan *cross section* Data time series yang digunakan data tahunan pada kurun waktu dari tahun 2011 hingga 2023 dari 33 provinsi di Indonesia Data penelitian berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) khususnya Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) serta Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP). Data diolah dengan menggunakan Stata 17.

Model penelitian ini menggunakan tenaga kerja sebagai variabel dependennya dengan memasukkan beberapa variabel bebas yang relevan dengan teori dan penelitian terdahulu. Penelitian Asaleye et al. (2018) menggunakan jumlah uang beredar (M_2) dan suku bunga sebagai proksi dari kebijakan moneter. Suku bunga kredit digunakan pada penelitian Babalola (2013) dan Azolibe et al. (2022). Sementara itu, proksi kebijakan fiskal mengacu pada penelitian Nasir et al. (2023) yang menggunakan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan investasi dan upah sebagai variabel kontrol yang pada penelitian-penelitian sebelumnya juga memengaruhi penyerapan tenaga kerja sebagaimana penelitian Basuki et al (2023). Variabel dalam model ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk mengurangi perbedaan nilai yang sangat besar karena adanya perbedaan satuan (Gujarati 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut persamaan model penelitian ini.

$$\ln TKit = \beta_0 + \beta_1 \ln JUBit + \beta_2 SBit + \beta_3 \ln PPit + \beta_4 \ln INVESit + \beta_4 \ln UPAHit + \text{it} \quad (2)$$

Keterangan:: TKit adalah jumlah tenaga kerja provinsi i pada tahun ke-t, JUBit adalah jumlah uang beredar provinsi i pada tahun ke-t, SBit adalah suku bunga kredit investasi provinsi i pada tahun ke-t, PPit adalah pengeluaran pemerintah provinsi i pada tahun ke-t, INVESit, Investasi dalam negeri (PMDN) provinsi i pada tahun ke-t, UPAHit: Rata-rata upah pekerja provinsi i pada tahun ke-t, β_0 : Konstanta (*intercept*), $\beta_1, 2, 3, 4$: Parameter dari masing-masing Variabel, i : *Cross section*, t : *Time series*, uit: *Error term*, ln: Logaritma natural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 2 merupakan hasil pemilihan model terbaik yang dilakukan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Terbaik

Uji Model Terbaik	Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow	0,000	FEM
Uji Hausman	0,000	FEM

Sumber: Hasil olahan Stata
17

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf nyata 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kita menolak hipotesis nol (H_0), sehingga model yang paling sesuai antara *Partial Least Squares* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah FEM. Selanjutnya, pada uji Hausman, nilai probabilitas yang diperoleh juga sebesar 0,000, yang kembali lebih kecil dari taraf nyata 5 persen. Ini berarti kita juga menolak hipotesis nol (H_0) pada uji ini, yang menunjukkan bahwa model yang paling tepat antara FEM dan *Random Effect Model* (REM) adalah FEM. Dengan demikian, berdasarkan hasil kedua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Penggunaan FEM ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan akurat terhadap data panel yang tersedia, dengan mempertimbangkan efek tetap yang ada dalam variabel-variabel yang diteliti. Model ini juga memberikan keuntungan dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autocorrelation, sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan robust.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model FEM dengan *robust standard error*

Variabel	Koefisien	<i>Robust Std. Error</i>	Probabilitas
lnJUB	0,277**	0,057	0,000
SB	-0,003**	0,003	0,004
lnPP	0,200*	0,094	0,042
lnINVES	0,016**	0,003	0,000
lnUPAH	-0,018	0,043	0,671
C	8,460**	1,310	0,000
	<i>R-Squared</i>		0,721
	<i>Prob(F-Statistic)</i>		0,000

*) Signifikan pada taraf nyata 5 persen, **) Signifikan pada taraf nyata 1 persen
 Sumber: Hasil olahan Stata 17

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan robust standard error, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,7251. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dijelaskan hingga 72,10 persen oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model. Artinya, ada sekitar 27,90 persen variasi penyerapan tenaga kerja yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak ditangkap oleh analisis ini.

Hasil pengujian F-Statistik menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyata 5 persen, yaitu 0,000. Ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya, analisis melalui uji t-statistik mengungkapkan bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata

1 persen, yaitu jumlah uang beredar, suku bunga kredit, dan investasi. Ketiga variabel ini menunjukkan hubungan yang kuat dengan penyerapan tenaga kerja, yang menegaskan pentingnya peran mereka dalam mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Meskipun pengeluaran pemerintah juga menunjukkan pengaruh signifikan, hal ini terjadi pada taraf nyata 5 persen, menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh, dampaknya tidak sekuat ketiga variabel lainnya.

Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

1. Jumlah uang beredar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada taraf nyata 1 persen, dengan nilai koefisien sebesar 0,277. Ini berarti bahwa jika rata-rata jumlah uang beredar meningkat sebesar 1 persen, penyerapan tenaga kerja di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 0,277 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asaleye et al. (2018) dan Sekmen serta Gorimak (2019), yang juga menemukan hubungan positif antara jumlah uang beredar dan penyerapan tenaga kerja. Pizzuto (2020) menambahkan bahwa kebijakan moneter kontraktif dapat menurunkan pendapatan per kapita riil dan penyerapan tenaga kerja di tingkat regional, dengan dampak yang bervariasi antar wilayah.

Kebijakan moneter berperan penting dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme permintaan agregat. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang beredar, kurva LM akan bergeser ke kanan. Hal ini akan menyebabkan penurunan suku bunga, yang selanjutnya mendorong peningkatan investasi. Investasi sendiri merupakan salah satu komponen kunci dari permintaan agregat; peningkatan investasi akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, diikuti oleh peningkatan output. Menurut Borjas (2008), permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dari produksi barang dan jasa, sehingga peningkatan kapasitas produksi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja.

Peningkatan pemanfaatan atau permintaan tenaga kerja dalam perekonomian menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Wahidin, 2018). Dengan demikian, kebijakan moneter yang mendukung peningkatan jumlah uang beredar tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk merumuskan kebijakan yang seimbang dan responsif terhadap dinamika ekonomi, agar dampak positif dari peningkatan jumlah uang beredar dapat tercapai secara maksimal. Strategi yang tepat dalam pengelolaan kebijakan moneter dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

2. Suku bunga kredit terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Suku bunga kredit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada taraf nyata 1 persen, dengan nilai koefisien sebesar 0,003. Ini berarti bahwa setiap kenaikan rata-rata suku bunga kredit sebesar 1 persen diperkirakan akan menyebabkan penurunan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 0,3 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Babalola (2013) dan Azolibe et al. (2022), yang juga mengkonfirmasi adanya hubungan negatif signifikan antara suku bunga kredit dan penyerapan tenaga kerja. Syakur et al. (2022) menambahkan bahwa peningkatan suku bunga kredit dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral berperan penting dalam mempengaruhi suku bunga di sektor keuangan. Proses perubahan suku bunga dari bank ke masyarakat tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui mekanisme transmisi yang kompleks. Ridhwan et al. (2014) mencatat bahwa saluran suku bunga dan kredit merupakan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang signifikan dalam mempengaruhi ekonomi riil di tingkat regional Indonesia. Aginta et al (2022) menegaskan bahwa mekanisme transmisi melalui saluran suku bunga berfungsi dengan baik di tingkat regional, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penyampaian kebijakan moneter.

Suku bunga kredit, sebagai suku bunga jangka panjang dalam mekanisme transmisi ini, sangat mempengaruhi keputusan investasi. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan, hal ini akan berdampak pada penurunan suku bunga jangka pendek, seperti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB), yang kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan komponen penting dalam biaya modal (*cost of capital*), sehingga penurunan suku bunga kredit dapat mendorong peningkatan investasi. Peningkatan investasi ini akan merangsang permintaan agregat, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Maka, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan interaksi yang kompleks antara suku bunga kredit, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan moneter yang dirancang dengan baik dapat menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dengan memahami mekanisme ini, para pengambil keputusan dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menstabilkan ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

1. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Pengeluaran pemerintah sebagai proksi kebijakan fiskal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada taraf nyata 5 persen, dengan nilai koefisien sebesar 0,2. Ini menunjukkan bahwa jika rata-rata pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 persen, penyerapan tenaga kerja di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 0,200 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azolibe et al. (2022), Santanu et al(2023), serta Nasir et al. (2023), yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Seperti halnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal memengaruhi penyerapan tenaga kerja melalui saluran permintaan agregat. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran, hal ini akan menggeser kurva IS ke kanan, yang berdampak pada peningkatan output. Peningkatan output ini mencerminkan pergeseran ke kanan dalam kurva permintaan agregat, yang menunjukkan bahwa lebih banyak barang dan jasa diperlukan dalam perekonomian. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk barang dan jasa, penggunaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi juga akan meningkat, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja lebih lanjut.

Ekspansi fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini sejalan

dengan Hukum Okun, yang menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, atau lebih tepatnya, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Hjazeen et al., 2021). Artinya, ketika ekonomi tumbuh, peluang kerja semakin banyak tersedia, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mendukung penyerapan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi alat strategis dalam mengatasi masalah pengangguran, terutama di masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja sangat diperlukan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek makroekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

2. *Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*

Investasi, yang diukur melalui realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada taraf nyata 1 persen, dengan nilai koefisien sebesar 0,016. Ini berarti bahwa setiap kenaikan rata-rata investasi sebesar 1 persen diperkirakan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 0,016 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan di berbagai sektor, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pentingnya investasi dalam menciptakan lapangan kerja dapat dijelaskan melalui teori Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa akumulasi modal (investasi) dan tabungan adalah kunci untuk meningkatkan output dan kesempatan kerja (Jhingan, 2014). Ketika investasi meningkat, modal yang tersedia untuk produksi juga bertambah, memungkinkan perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sering kali diiringi dengan kebutuhan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan kerja baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Basuki et al (2023) serta Pratama et al (2022), yang juga menemukan bahwa PMDN memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penemuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung investasi, terutama dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong iklim investasi yang kondusif, misalnya melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan penyediaan insentif bagi investor. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan aliran investasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap penyerapan tenaga kerja, yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, investasi dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

3. *Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*

Rata-rata upah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, baik pada taraf nyata 1 persen, 5 persen, maupun 10 persen. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal dan teori permintaan tenaga kerja yang menyatakan bahwa peningkatan upah seharusnya mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja, dengan asumsi faktor lain tetap (Sholeh, 2007).

Kondisi ini bisa dijelaskan oleh tingginya kontribusi sektor informal dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, yang mencapai 59,11 persen pada tahun 2023. Menurut Rothenberg (2016), rata-rata upah di sektor informal cenderung lebih rendah dan kurang

stabil dibandingkan dengan sektor formal. Sektor informal sering kali tidak menerapkan standar upah minimum yang berlaku, sehingga para pekerja di sektor ini menerima upah yang jauh di bawah harapan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan kontribusi tenaga kerja informal tertinggi, yaitu 73,35 persen. Di provinsi ini, rata-rata upah yang diterima pekerja hanya sebesar 2,20 juta rupiah, jauh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan sebesar 2,87 juta rupiah. Sebaliknya, Kepulauan Riau, yang memiliki kontribusi tenaga kerja informal terendah sebesar 33,67 persen, menunjukkan rata-rata upah yang lebih tinggi, yaitu 4,59 juta rupiah, yang juga melebihi upah minimum di provinsi tersebut (3,28 juta rupiah).

Selain itu, karakteristik pekerja di sektor informal juga berperan dalam fenomena ini. Sektor informal cenderung lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan keterampilan rendah (unskilled). Keterbatasan keterampilan ini membuat pekerja di sektor informal tidak sensitif terhadap perubahan upah. Banyak dari mereka yang tetap bertahan pada pekerjaan meskipun tingkat upah rendah, disebabkan oleh kesulitan dalam mencari pekerjaan alternatif, terutama di sektor formal. Hal ini menciptakan situasi di mana peningkatan upah tidak mendorong perubahan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nihayati et al. (2023), yang juga menunjukkan bahwa upah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pasar tenaga kerja, terutama dalam konteks sektor informal, dan bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan upah dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan memahami konteks ini, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak oleh rendahnya upah dan ketidakstabilan kerja.

PENUTUP

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dan investasi berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara suku bunga kredit berpengaruh negatif. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga memberikan kontribusi positif, meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan moneter ekspansif untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga kredit, sehingga dapat mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama melalui peningkatan pengeluaran untuk proyek-proyek padat karya. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga upaya-upaya yang diambil dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adriyanto, Prasetyo D, Khodijah R. 2020. Angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. 11(2):66-82.
- Aginta H, Someya M. 2022. Regional economic structure and heterogeneous effects of monetary policy: evidence from Indonesian provinces. *Journal of Economic Structures*. 11(1):1-25.
- Alvaro R. 2021. Pengaruh investasi, tenaga kerja, serta ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. *Journal Budget*. 6(1):114-131.

- Aseleye AJ, Popoola O, Lawal AI, Ogundipe A, Ezenwoke O. 2018. The credit channels of monetary policy transmission: implications on output and employment in Nigeria. *Banks and Bank Systems*. 13(4):103-118.
- Atmojo RW. 2018. Analisis efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap produk domestik bruto Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*. 7(2):194-202.
- Azolibe CB, Dimnwobi SK, Uzochukwu-Obi CP. The determinants of unemployment rate in developing economies: Does banking system credit matter?. *AGDI Working Paper*, No. WP/22/044, African Governance and Development Institute (AGDI), Yaoundé.
- Babalola AI. 2013. Interest rate and unemployment nexus in Nigeria. *International Journal of Research in Commerce, Economics, and Management*. 3(11):42- 446/
- Basuki AT, Ratnawati D. 2023. Analysis of influence of macroeconomics variables on labor absorption in Java island. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. 6(3):927-935.
- Bank Indonesia. 2024. Inflasi (yoy) Target dan Aktual. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/188/1/0>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMzIzI=/-seri-2010--2--pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran--2010-100-.html>
- Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011 – 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2023.html>
- Borjas GA. 2008. *Labor Economics*. Boston (US): McGraw-Hill.
- Bellante, Jackson M. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta(ID): FE UI.
- Chowdhury NM, Hossain M. 2018. Population Growth And Economic Development In Bangladesh: Revisited Malthus. *MPRA Paper 90826*, University Library of Munich, Germany.
- Gujarati DN. 2004. *Basic Econometrics*, Fourth Edition. New York (NY): The McGraw-Hill Companies.
- Hastuti P. 2018. Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI*.
- Hjazeen H, Seraj M, Ozdeser H. 2021. The Nexus Between The Economic Growth And Unemployment In Jordan. *Future Business Journal*. 7(1):1-8.
- Iswandir. 2013. Monetary policy in order stabilize macroeconomics. *Jurnal Mitra Manajemen*. 5(1): 27-35.
- Jhingan ML. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Konadi W dan Bariah C. 2014. Analisis investasi perbankan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Kebangsaan*. 3(6): 45-52.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Jakarta(ID): Kemnaker RI.
- Mankiw NG. 2006. *Makroekonomi, Edisi ke-7*. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- Mehar MA. 2023. Role of monetary policy in economic growth and development: from theory to empirical evidence. *Asian Journal of Economics and Banking*. 7(1): 99-120. doi: 10.1108/AJEB-12-2021-0148.

- Mehar MA. 2023. Role of monetary policy in economic growth and development: from theory to empirical evidence. *Asian Journal of Economics and Banking*. 7(1): 99-120.
- Mishkin FS, Eakins SG. 2012. *Financial Market & Institutions*. Seventh Edition. Pearson Education Inc
- Nanga M. 2005. *Makroekonomi Teori, Masalah & Kebijakan*. Jakarta(ID): PT RajaGrafindo Persada.
- Nihayati I, Nikensari SI, Sariwulan T. 2023. Analysis of the influence of real wages, investment and education level on labor absorption. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*. 1(3): 304-414.
- Ningsih PA, Setyowati E, Hasmarini MI, Purnomo D. The influence of monetary policy and economic factors on employment opportunities in ASEAN 6 countries. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. 7(1):833-846.
- Pizzuto P. 2020. Regional effects of monetary policy in the U.S.: An empirical re-assessment. *Economics Letters*.190(3):1-6.
- Pohan A. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*. Jakarta (ID). PT RajaGrafindo Persada.
- Pratama IA, Anis A. 2022. Pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 4(3):37-42.
- Ridhwan MM, Groot HLF, Rietveld P, Nijkamp P. 2014. The regional impact of monetary policy in Indonesia. *Growth and Change*. 45(2):240-262.
- Rothenberg AD, Gaduh A, Burger NE, Chazali C, Tjandraningsih I, Radikun R, Sutera C, Weilandt S. 2016. Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*. 80:96-113. doi: 10.1016/j.worlddev.2015.11.005
- Santanu G, Wardani KDJ. 2023. How government expenditures and economic growth works on labor absorption. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 18(3):487-493.
- Sekmen F, Gorimak H. Money supply, employment, and national income inequality. *Energy, Environment And Economics Research*. 153-168.
- Sholeh M. 2007. Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah : Teori serta beberapa potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. 4(1):62-75.
- Sirojuzilam AM. 2021. Analysis of the effect of monetary policy and fiscal policy on unemployment with economic growth as a moderating variable in Indonesia. *International Journal of Research and Review*. 8(3): 64-70.
- Sudirman IW. 2014. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*. Jakarta(ID): Kencana.
- Syakur RM, Reviane ITA, Paddu AH. 2022. The influence of fiscal and monetary policy on Indonesia's economic growth. *Jurnal Economic Resources*. 4(2):20- 31.
- Todaro MP. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta(ID): Erlangga.
- Triwibowo S, Oktaviani D. 2022. Asymmetric impacts of monetary policy shock on output gap: evidence from regions in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. 25(3):371-398.
- Ulya W, Rahmatia, Sabir, Hamrullah. 2022. Determinants of labor absorption in eastern Indonesia. *Enrichment: Journal of Management*. 12(5): 3789-3794.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.
- Warjiyo P. 2004. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Buku Seri Kebanksentralan No.11. Jakarta (ID): PPSK(Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan).